

**PENDEKATAN MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBINA
KARAKTER MAHASISWA SEBAGAI UPAYA UNTUK MENANGKAL
TANTANGAN GLOBAL**

Drs. Darmawan, M.Pd.

Wawanwawan863@yahoo.com

Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang

Abstrak

Berbicara pembentukan kepribadian tidak lepas dengan bagaimana kita membentuk karakter SDM. Pembentukan karakter SDM menjadi vital dan tidak ada pilihan lagi untuk mewujudkan Indonesia baru, yaitu Indonesia yang dapat menghadapi tantangan regional dan global. Tantangan regional dan global yang dimaksud adalah bagaimana generasi muda kita tidak sekedar memiliki kemampuan kognitif saja, tapi aspek afektif dan moralitas juga tersentuh. Untuk itu, Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis karakter diperlukan untuk mencapai manusia yang memiliki integritas nilai-nilai moral sehingga anak menjadi hormat dengan sesama, jujur dan peduli dengan lingkungan. Pendidikan multikultural dapat berlangsung dalam setting pendidikan formal atau informal, langsung atau tidak langsung. Pendidikan multikultural diarahkan untuk mewujudkan kesadaran, toleransi, pemahaman, dan pengetahuan yang mempertimbangkan perbedaan kultural, dan juga perbedaan dan persamaan antar budaya dan kaitannya dengan pandangan dunia, konsep, nilai, keyakinan, dan sikap (Lawrence J. Saha, 1997: 348). Pendidikan multikultural adalah konsep atau ide sebagai suatu rangkaian kepercayaan (set of believe) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi dan kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara (James A. Bank, 2001: 28). Tujuan pendidikan multikultural yang berkaitan dengan aspek sikap (attitudinal goals) adalah untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan kultural, toleransi kultural, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsive terhadap budaya, keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik. *Kedua*, tujuan pendidikan multikultural yang berkaitan dengan aspek pengetahuan (cognitive goals) adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain, dan kemampuan untuk menganalisis dan

menerjemahkan perilaku kultural, dan pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural. *Terakhir*, tujuan pendidikan multikultural yang berkaitan dengan pembelajaran (instructional goals) adalah untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran; memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, memberikan alat konseptual untuk komunikasi antar budaya; mengembangkan keterampilan interpersonal; memberikan teknik-teknik evaluasi; membantu klarifikasi nilai; dan menjelaskan dinamika kultural. Maka pada tulisan ini kita akan membahas bagaimana mengembangkan pendekatan multikultural tersebut melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan cara menanamkan kesadaran kewarganegaraan (Civic Virtue) dalam hal ini dapat dikaitkan dengan multikulturalisme budaya di Indonesia guna membangun karakter bangsa.

Kata Kunci: Pendekatan Multikultural, Pendidikan Kewarganegaraan, Karakter, Mahasiswa

A. Pendahuluan

Dalam konteks Indonesia, pendidikan multikultural menjadi suatu keniscayaan, karena kondisi sosial budaya bangsa dan negara Indonesia yang sangat beragam. Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang besar dan dengan budaya yang sangat beragam. Sekitar 222,7 juta penduduk yang tersebar lebih dari 6.000 pulau.

Wilayah Indonesia tersusun atas 33 propinsi, 440 kabupaten/kota, 5.263 kecamatan, serta 62.806 desa. Terdapat puluhan suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda, dan lebih dari 660 bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk Indonesia. Sejumlah 293.419 satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA) di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, total 51,3 juta siswa dan 3,31 juta guru. Dan dari tujuan pendidikan multikultural maka dapat kita lihat bagaimana ruang lingkup dari pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan multikultural dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam tujuan, yaitu: tujuan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan pembelajaran (Lawrence J. Saha, 1997: 349).

Pendidikan multikultural adalah konsep atau ide sebagai suatu rangkaian kepercayaan (set of believe) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi dan kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara (James A. Bank, 2001: 28).

Pendidikan multikultural dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek: konsep, gerakan, dan proses (James A. Bank, 1989: 2-3). Dari aspek konsepnya, pendidikan multikultural dipahami sebagai ide yang memandang semua siswa tanpa memperhatikan gender dan kelas sosial mereka, etnik mereka, ras mereka, dan atau karakteristik-karakteristik kultural lainnya, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di kelas. Sedangkan dari aspek gerakannya, pendidikan multikultural didefinisikan sebagai usaha untuk mengubah sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan sehingga siswa dari semua kelas sosial, gender, ras, dan kelompok-kelompok kultural memiliki kesempatan yang sama untuk belajar.

Lawrence A Blum, seorang profesor filsafat di University of Massachusetts di Amherst menawarkan definisi multikulturalisme sebagai berikut:

Multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari budaya-budaya tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri. (Blum, 2001:16).

B. Tinjauan Pustaka

1. Masyarakat Multikultural

Keinginan menyelenggarakan pendidikan multikultural biasanya muncul dalam masyarakat majemuk yang menyadari kemajemukannya. Masyarakat seperti ini menyadari dirinya terdiri dari berbagai golongan yang berbeda secara etnis, sosial-ekonomis, dan kultural. Masyarakat ini sering disebut masyarakat pluralistik atau

masyarakat heterogen. Sebaliknya, dalam masyarakat homogen masyarakat yang memiliki identitas ras atau etnis yang sama, serta mengikuti gaya hidup dengan watak kultural yang sama umumnya tidak ada keinginan publik untuk menyelenggarakan pendidikan multikultural. Di Jepang atau Norwegia, tidak terasa adanya kebutuhan pendidikan multikultural. Tetapi di Australia, Inggris, Perancis, Jerman, dan Belanda, amat terasa betapa ketiadaan pendidikan multikultural menimbulkan berbagai ketegangan dalam kehidupan sosial.

Mengapa demikian? Karena dalam setiap masyarakat majemuk selalu ada prasangka yang memengaruhi interaksi sosial antara berbagai golongan penduduk. Berbagai prasangka sosial dalam masyarakat majemuk tidak bersifat langgeng. Dari waktu ke waktu, berbagai prasangka itu berubah. Perubahan dalam prasangka ini dapat menuju interaksi sosial yang lebih baik atau lebih jelek. Dalam kurun waktu tertentu, golongan-golongan penduduk bisa menjadi lebih saling mencurigai, saling membenci, tetapi juga bisa menjadi saling memahami dan saling menghormati. Ini ditentukan oleh cara berbagai golongan penduduk dalam suatu masyarakat majemuk mengelola prasangka-prasangka sosial yang ada dalam diri masing-masing.

Pendidikan multikultural merupakan upaya kolektif suatu masyarakat majemuk untuk mengelola berbagai prasangka sosial yang ada dengan cara-cara yang baik. Tujuannya, menciptakan hubungan lebih serasi dan kreatif di antara berbagai golongan penduduk dalam masyarakat. Melalui pendidikan multikultural, siswa yang datang dari berbagai golongan penduduk dibimbing untuk saling mengenal cara hidup mereka, adat-istiadat, kebiasaan, memahami aspirasi-aspirasi mereka, serta untuk mengakui dan menghormati bahwa tiap golongan memiliki hak untuk menyatakan diri menurut cara masing-masing.

Alasan yang melatar belakangi adanya pendidikan multikultural adalah keberadaan masyarakat dengan individu-individu yang beragam latar belakang bahasa dan kebangsaan (nationality), suku (race or ethnicity), agama (religion), gender, dan kelas sosial (social class). Keragaman latar belakang individu dalam masyarakat tersebut berimplikasi pada keragaman latar belakang peserta didik dalam suatu

lembaga pendidikan (Bank, 1989: 14). Dalam konteks Indonesia, peserta didik di berbagai lembaga pendidikan diasumsikan juga terdiri dari peserta didik yang memiliki beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya.

Asumsi ini dibangun berdasarkan pada data bahwa di Indonesia terdapat 250 kelompok suku, 250 lebih bahasa lokal (lingua franca), 13.000 pulau, dan 5 agama resmi (Leo Suryadinata, dkk., 2003: 30, 71, 104, dan 179). Paling tidak keragaman latar belakang siswa di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia terdapat pada paham keagamaan, afiliasi politik, tingkat sosial ekonomi, adat istiadat, jenis kelamin, dan asal daerahnya (perkotaan atau pedesaan).

Hal lain yang melatarbelakangi adanya pendidikan multikultural adalah adanya tiga teori sosial yang dapat menjelaskan hubungan antar individu dalam masyarakat dengan beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya. Menurut Ricardo L. Garcia (1982: 37-42) ada 3 teori tersebut populer dengan sebutan teori masyarakat majmuk (communal theory). Ketiga teori sosial tersebut adalah:

- (1) Melting Pot I: Anglo Conformity,
- (2) Melting Pot II: Ethnic Synthesis,
- (3) Cultural Pluralism: Mosaic Analogy.

Teori pertama, Melting Pot I: Anglo Conformity, berpandangan bahwa masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang beragam latar belakang; seperti agama, etnik, bahasa, dan budaya harus disatukan ke dalam satu wadah yang paling dominan. Teori ini melihat individu dalam masyarakat secara hirarkis, yaitu kelompok mayoritas dan minoritas. Bila mayoritas individu dalam suatu masyarakat adalah pemeluk agama Islam, maka individu lain yang memeluk agama non-Islam harus melebur ke dalam Islam. Bila yang mendominasi suatu masyarakat adalah individu yang beretnik Jawa, maka individu lain yang beretnik non-Jawa harus mencair ke dalam etnik Jawa, dan demikian seterusnya. Teori ini hanya memberikan peluang kepada kelompok mayoritas untuk menunjukkan identitasnya. Sebaliknya, kelompok minoritas sama sekali tidak memperoleh hak untuk

mengekspresikan identitasnya. Identitas di sini bisa berupa agama, etnik, bahasa, dan budaya. Teori ini tampak sangat tidak demokratis.

Karena teori pertama tidak demokratis, maka muncullah teori kedua, yaitu Melting Pot II: Ethnic Synthesis. Teori yang dipopulerkan oleh Israel Zangwill ini memandang bahwa individu-individu dalam suatu masyarakat yang beragam latar belakangnya, disatukan ke dalam satu wadah, dan selanjutnya membentuk wadah baru, dengan memasukkan sebagian unsur budaya yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam masyarakat tersebut. Identitas agama, etnik, bahasa, dan budaya asli para anggotanya melebur menjadi identitas yang baru, sehingga identitas lamanya menjadi hilang. Bila dalam suatu masyarakat terdapat individu-individu yang beretnik Jawa, Sunda, dan Batak, misalnya, maka identitas asli dari ketiga etnik tersebut menjadi hilang, selanjutnya membentuk identitas baru. Islam Jawa di kraton dan masyarakat sekitarnya yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kejawen adalah salah satu contohnya. Teori ini belum sepenuhnya demokratis, karena hanya mengambil sebagian unsur budaya asli individu dalam masyarakat, dan membuang sebagian unsur budaya yang lain.

Mengingat teori kedua belum sepenuhnya demokratis, maka muncullah teori ketiga, yaitu Cultural Pluralism: Mosaic Analogy. Teori yang dikembangkan oleh Berkson ini berpandangan bahwa masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya, memiliki hak untuk mengekspresikan identitas budayanya secara demokratis. Teori ini sama sekali tidak meminggirkan identitas budaya tertentu, termasuk identitas budaya kelompok minoritas sekalipun. Bila dalam suatu masyarakat terdapat individu pemeluk agama Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu, maka semua pemeluk agama diberi peluang untuk mengekspresikan identitas keagamaannya masing-masing. Bila individu dalam suatu masyarakat berlatar belakang budaya Jawa, Madura, Betawi, dan Ambon, misalnya, maka masing-masing individu berhak menunjukkan identitas budayanya, bahkan diizinkan untuk mengembangkannya. Masyarakat yang menganut teori ini, terdiri dari individu yang sangat pluralistik, sehingga masing-masing identitas individu dan kelompok dapat hidup dan membentuk mosaik yang indah.

2. Peran Pendidikan kewarganegaraan Dalam Membina Karakter Mahasiswa melalui Pendekatan Pendidikan Multikultural

Pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian sebagai citizenship education secara substantive dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warganegara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur pendidikan dan jenjang pendidikan (Udin S W,2003:745).

Secara akademik PKN memiliki visi sebagai nation and character building atau sering dikenal memiliki mengIndonesiakan orang Indonesia. PKN hadir untuk mendidik kebangsaan warga Negara dari perspektif politik, etnis yang berbeda-beda.(Hasan Suryono, 2008 : 21)

Secara Yuridis PKN tertuang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan, kurikulumnya memuat substansi norma dan perundang-undangan baik pada tingkat pusat maupun daerah. Masing-masing jenjang pendidikan memuat standar kompetensi di jabarkan dalam kompetensi dasar selalu ditekankan adanya pengamalan atau pelaksanaan, tidak terkecuali pelaksanaan atau penerapan apa yang telah dipelajari. Dengan adanya ketentuan UU tersebut, maka kedudukan pendidikan kewarganegaraan sebagai basis pengembangan masyarakat multikultural dalam sistem pendidikan di Indonesia semakin jelas dan mantap.

Secara umum, negara mengem-bangkan pendidikan kewarganegaraan di tingkat persekolahan adalah bertujuan agar setiap warganegara menjadi warganegara yang baik (to be good citizenship), yakni warganegara yang memiliki kecerdasan, baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab; dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Dalam hal ini kita dapat meng-aplikasikan kesadaran berwarga negara (civic virtue) ini sebagai indikator untuk pemahaman implementasinya dalam pendidikan multikultural. Dalam hal ini kita melihat bahwa civic virtue memiliki suatu gagasan

tentang warga negara yang memiliki hak dan kewajiban sama sebagai warga negara dengan kompetensi yang bercirikan multikultural.

Menurut Branson (1998:16), kompetensi kewarganegaraan terdiri atas tiga komponen penting, yaitu: 1) Civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara; 2) Civic skill (keterampilan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warganegara yang relevan; dan 3) Civic disposition (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Maka dalam hal ini sebagai warga negara tidak hanya sebagai warga negara yang pasif tetapi harus bisa sebagai warga negara yang aktif dalam statusnya sebagai warga negara yang bisa di arahkan ke civic Virtue.

Bagaimana strategi civic virtue dalam pembelajaran pendidikan kewarga-negaraan sebagai pendidikan multikultural yang dibutuhkan dalam mengembangkan masyarakat multikultural sehingga terbentuk karakter bangsa yang akan menjadi identitas?

Ricardo L. Garcia (Abdullah Aly, 2005) menyebutkan tiga faktor dalam manajemen pembelajaran, yaitu: (a) lingkungan fisik (physical environment), (b) lingkungan sosial (human environment), dan (c) gaya pengajaran guru (teaching style). Untuk menciptakan lingkungan fisik yang aman dan nyaman, pengajar dapat mempertimbangkan aspek fasilitas yang memadai dalam Kegiatan belajar mengajar. Pengajar yang memiliki pemahaman terhadap latar belakang budaya siswanya, akan menciptakan lingkungan fisik yang kondusif untuk belajar. Sementara itu, lingkungan sosial yang aman dan nyaman dapat diciptakan oleh guru melalui bahasa yang dipilih, hubungan simpatik antar siswa, dan perlakuan adil terhadap siswa yang beragam budayanya.

Selain lingkungan fisik dan sosial, siswa juga memerlukan gaya pengajaran guru yang menggembirakan. Dalam proses pembelajaran, gaya kepemimpinan guru sangat berpengaruh bagi ada tidaknya peluang siswa untuk berbagi pendapat dan

membuat keputusan. Gaya kepemimpinan guru berkisar pada otoriter, demokratis, dan bebas . Gaya kepemimpinan otoriter tidak memberikan peluang kepada siswa untuk saling berbagi pendapat. Apa yang diajarkan guru kepada siswa ditentukan sendiri oleh guru. Sebaliknya, gaya kepemimpinan guru yang demokratis memberikan peluang kepada siswa untuk menentukan materi yang perlu dipelajari siswa. Selanjutnya, guru yang menggunakan gaya kepemimpinan bebas guru menyerahkan sepenuhnya kepada siswa untuk menentukan materi pembelajaran di kelas.

Untuk menjadi guru yang demokratis, guru harus memiliki kompetensi multikultural. Menurut, Farid El Ashmawi dan Philip P. Harris (Abdullah Aly, 2005) menawarkan enam kompetensi multikultural guru, yaitu:

- (a) memiliki nilai dan hubungan sosial yang luas,
- (b) terbuka dan fleksibel dalam mengelola keragaman siswa,
- (c) siap menerima perbedaan disiplin ilmu, latar belakang, ras, dan gender;
- (d) memfasilitasi pendatang baru dan siswa yang minoritas,
- (e) mau berkolaborasi dan koalisi dengan pihak mana pun, dan
- (f) berorientasi pada program dan masa depan.

Dilihat dari kompetensi tersebut, civic virtue di kehidupan pendidikan sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral yang mengajarkan nilai-nilai dan norma sebagai warga negara yang baik (citizenship). Sehingga peran sadar untuk statusnya sebagai warga negara perlu di bina sejak dini, karena hal ini dapat diterapkan dalam pendidikan multikultural yang tidak hanya secara kognitif saja, tetapi harus ada afektif dan psikomotorik sebagai perantaranya.

3. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Karakter

Melihat kondisi sekarang dan akan datang, ketersediaan SDM yang berkarakter merupakan kebutuhan yang amat vital. Ini dilakukan untuk mempersiapkan tantangan global dan daya saing bangsa. Tim Pendidikan Karakter Kemendiknas (2010:9-10) menyatakan *visi Depdiknas 2014* adalah sebagai berikut:

Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif. Pemahaman insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. (1) Cerdas spiritual : beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul; berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan; bersemangat juang tinggi; mandiri; pantang menyerah; pembangun dan pembina jejaring; bersahabat dengan perubahan; inovatif dan menjadi agen perubahan; produktif; sadar mutu; berorientasi global; pembelajaran sepanjang hayat; dan menjadi rahmat bagi semesta alam; (2) Cerdas emosional dan sosial: beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya; beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang membina dan memupuk hubungan timbal balik; demokratis; empatik dan simpatik; menjunjung tinggi hak asasi manusia; ceria dan percaya diri; menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara; (3) Cerdas intelektual: beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif; (4) Cerdas kinestetis: beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdayatahan, sigap, terampil, dan trengginas; serta aktualisasi insan adiraga....

Lickona (1992) menjelaskan beberapa alasan perlunya Pendidikan karakter, di antaranya: (1) Banyaknya generasi muda saling melukai karena lemahnya kesadaran pada nilai-nilai moral, (2) Memberikan nilai-nilai moral pada generasi muda merupakan salah satu fungsi peradaban yang paling utama, (3) Peran sekolah sebagai pendidik karakter menjadi semakin penting ketika banyak anak-anak memperoleh sedikit pengajaran moral dari orangtua, masyarakat, atau lembaga

keagamaan, (4) masih adanya nilai-nilai moral yang secara universal masih diterima seperti perhatian, kepercayaan, rasa hormat, dan tanggungjawab, (5) Demokrasi memiliki kebutuhan khusus untuk pendidikan moral karena demokrasi merupakan peraturan dari, untuk dan oleh masyarakat, (6) Tidak ada sesuatu sebagai pendidikan bebas nilai. Sekolah mengajarkan pendidikan bebas nilai. Sekolah mengajarkan nilai-nilai setiap hari melalui desain ataupun tanpa desain, (7) Komitmen pada pendidikan karakter penting manakala kita mau dan terus menjadi guru yang baik, dan (7) Pendidikan karakter yang efektif membuat sekolah lebih beradab, peduli pada masyarakat, dan mengacu pada performansi akademik yang meningkat.

Pandangan ini mengilustrasikan bahwa proses pendidikan yang ada di pendidikan formal, non formal dan informal harus mengajarkan peserta didik atau anak untuk saling peduli dan membantu dengan penuh keakraban tanpa diskriminasi karena didasarkan dengan nilai-nilai moral dan persahabatan. Di sini nampak bahwa peran pendidik dan tokoh panutan sangat membantu membentuk karakter peserta didik atau anak. Upaya untuk mengimplementasikan pendidikan karakter adalah melalui Pendekatan Holistik, yaitu mengintegrasikan perkembangan karakter ke dalam setiap aspek kehidupan sekolah. Berikut ini ciri-ciri pendekatan holistik (Lickona, 1992). Segala sesuatu di sekolah diatur berdasarkan perkembangan hubungan antara siswa, guru, dan masyarakat. Sekolah merupakan masyarakat peserta didik yang peduli di mana ada ikatan yang jelas yang menghubungkan siswa, guru, dan sekolah

Pembelajaran emosional dan sosial setara dengan pembelajaran akademik. Kerjasama dan kolaborasi di antara siswa menjadi hal yang lebih utama dibandingkan persaingan. Nilai-nilai seperti keadilan, rasa hormat, dan kejujuran menjadi bagian pembelajaran sehari-hari baik di dalam maupun di luar kelas. Siswa-siswa diberikan banyak kesempatan untuk mempraktekkan perilaku moralnya melalui kegiatan-kegiatan seperti pembelajaran memberikan pelayanan. Disiplin dan pengelolaan kelas menjadi fokus dalam memecahkan masalah dibandingkan hadiah dan hukuman. Model pembelajaran yang berpusat pada guru harus

ditinggalkan dan beralih ke kelas demokrasi di mana guru dan siswa berkumpul untuk membangun kesatuan, norma, dan memecahkan masalah.

Sementara itu peran lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan karakter mencakup (1) mengumpulkan guru, orang tua dan siswa bersama-sama mengidentifikasi dan mendefinisikan unsur-unsur karakter yang mereka ingin tekankan, (2) memberikan pelatihan bagi guru tentang bagaimana mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kehidupan dan budaya sekolah, (3) menjalin kerjasama dengan orangtua dan masyarakat agar siswa dapat mendengar bahwa perilaku karakter itu penting untuk keberhasilan di sekolah dan di kehidupannya, dan (4) memberikan kesempatan kepada kepala sekolah, guru, orangtua dan masyarakat untuk menjadi model perilaku sosial dan moral.

C. Penutup

Jika melihat uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural khususnya di Indonesia, sangat perlu sekali dibina dan dikembangkan sejak dini dari mulai anak-anak sadar untuk mengenali lingkungannya agar nanti pada waktu mereka sudah dewasa bisa mengakui bangsa Indonesia adalah satu keluarga walaupun ada yang dari sisi berbeda ras, agama, jenjang sosial dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Kewarga-negaraan di tingkat persekolahan yang ingin membentuk kompetensi-kompetensi sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara bermutu dan ber-tanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.

4. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

D. Daftar Pustaka

Agustian, Ary Ginanjar. *Membangun Sumber Daya Manusia dengan Kesinergisan antara Kecerdasan Spiritual, Emosional, dan Intelektual*. Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Kehormatan Doctor Honoris Causa di Bidang Pendidikan Karakter, UNY 2007.

Azra, Azyumardi. *Agama, Budaya, dan Pendidikan Karakter Bangsa*. 2006

Berns, R.G. and P.M. Erickson, 2001. Contextual teaching and learning: Preparing students for the new economy. *The Highlight Zone: Research @ Work* No. 5.

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_ERICExtSearch_SearchValue_0=ED452376&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED45237

Blanchard, A., 2001. Contextual teaching and learning. Educational services, horizons electronic lesson plans resource. <http://coe.csusb.edu/scarcella/helpr.pdf>

Branson, M.S. and C.N. Quigley, 1998. *The Role of Civic Education*. Center for

Civic Education, Calabasas, pp:46. <http://books.google.com.pk/books?id=22zEGwAA CA AJ&dq=The+Role+of+Civic+Education>

Branson, M.S., 1999. *Making the case for civic education: Where we stand at the end of the 20th*

Century. CCE, Washington DC. http://www.civiced.org/papers/articles_mb_june99.Html

Center for Civic Education, 1991. *Civitas: A Framework for Civic Education*, 1st Edn., Calabasas,

CA, ISBN: 10: 0898181240, pp: 537.

Cogan, J.J., P. Morris and M. Print, 2002. *Civic Education in the Asia-Pacific Region: Case Studies*

across Six Societies. 1st Edn., Routledge Falmer, United States, ISBN: 10: 0415932130, pp: 224.

Kerr, D., 1999. *Citizenship education: An international comparison*. National Foundation for

Educational Research (NFER), London.
http://inca.org.uk/pdf/citizenship_no_intro.pdf

Lickona, Thomas, *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books, 1992.

National Center for Learning and Citizenship (NCLC), 2007. *Resources to assess student civic competencies and school climate*.
http://www.ecs.org/ecsmain.asp?page=Qna/splash_new.asp

Sairin, Weinata. *Pendidikan yang Mendidik*. Jakarta: Yudhistira, 2001

Sounders, J., 1999. *Contextually based learning: Fad or proven*

practice.<http://www.aypf.org/forumbriefs/1999/fb070999.htm>

Suyanto dan Hisyam, Djihad. *Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III: Refleksi dan*

Reformasi. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000.

Suyatno; Sumedi, Pudjo, dan Riadi, Sugeng (Editor). *Pengembangan Profesionalisme Guru: 70*

Tahun Abdul Malik Fadjar. Jakarta: UHAMKA Press, 2009.